



Kementerian
Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup
Republik Indonesia



UK International
Development
Partnership | Progress | Prosperity

UN-REDD
PROGRAMME



Meeting / Nama Agenda:	Dialog dan Penguatan Bersama Organisasi Masyarakat Sipil di Riau		
Date / Hari, Tanggal:	Kamis, 03 September 2026	Start time / Waktu mulai:	08.00
Location / Tempat Kegiatan:	Zoom meeting	End time / Waktu selesai:	selesai
Type of Activity / Jenis kegiatan	☐ Meeting ☐ Coordination ☐ Workshop ☒ FGD	Minute taker / Notulen:	Rizqy Umami Siregar

1. Objectives of the Meeting / Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman, menyerap masukan, dan mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengembangan GREEN for Riau, khususnya terkait kesiapan REDD+, pendanaan, perhutanan sosial, masyarakat adat, serta kesetaraan gender dan inklusi sosial.

2. Participants / Peserta

Daftar peserta:

1. Syahrozie, SH — Yayasan Tekad Anak Negeri (YATANI)
2. M. Nur Anam — PALKKA
3. Amniati — Riau Women Working Group
4. Sarah Nisrina — PPSW Riau
5. Aiden Yusti — Belantara Foundation
6. Hasri Dinata — Perkumpulan Bahtera Alam
7. Wirdati Irma — FORDAS
8. Delfi Trisnawati — Yayasan Lembaga Riset Ekologi
9. Yuyu Arlan — PASA
10. Masriadi — Yayasan PELOPOR Sehati
11. Desriandi — Yayasan Hutan Riau
12. ARIF M — YATANI
13. Sri Wahyuni — Yayasan Bunga Bangsa
14. ZULKIFLI — BAPPEDA Prov. Riau
15. Okto Yugo Setiyo — Jikalahari
16. Mahendra — WALHI Riau
17. Jeffri Sianturi — Paradigma
18. Susanto Kurniawan — Tenaga Ahli GREEN for Riau
19. Teddy Hardiyansyah — Pokja PKSR
20. Ainul Azizah — Yayasan Gambut
21. Ali Husin Nasution — KBHR
22. Yesi Hairian Wenda — Bdpr
23. Jeffri — Paradigma
24. Alpian — Yakopi
25. Margaretha Nurrinisa — WWF Indonesia
26. Yuliantony — Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo
27. Wahyudi — Yayasan SIKLUS





Kementerian
Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup
Republik Indonesia



UK International
Development
Partnership | Progress | Prosperity

UN-REDD
PROGRAMME



28. DESY HAIRANY, SP, MP, M. Eng — Bappeda Provinsi Riau
29. Syarifah Aminah, S.A.P — Bappeda Provinsi Riau
30. Yanda Rahmanto — Laskar Penggiat Ekowisata
31. OKTA FIANDRI MN — BAPPEDA PROVINSI RIAU
32. Jendra Parlindungan, SE — Bappeda Provinsi Riau
33. Ikhsan Fitra — LPAD Riau
34. HERI YANTO — FKPMR
35. Susanto Kurniawan — Tenaga Ahli GREEN for Riau
36. Melani Amalia Massie — Yayasan PETAI
37. Ratna Akiefnawati — Daemeter
38. Muhammad Iskandar — Keslimasy
39. Johny Setiawan Mundung — Yayasan Inisiatif Bumi Swarnadwipa
40. Eiyanto — Forum Masyarakat Peduli Semenanjung Kampar
41. Nurul Fitria — Mongabay Indonesia
42. Johny Setiawan Mundung — Yayasan Inisiatif Bumi Swarnadwipa
43. Istiqomah Marfuah — Perkumpulan PPAB (Sustainable Watch)
44. MISLIANITA — Bappeda Provinsi Riau
45. Hasan Supriyanto — FKMM Wilayah Riau
46. Reni Nurhaeni — DLHK Provinsi Riau
47. Rizqy Ummi Siregar — Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia
48. Muhamad Sardi — Bappda
49. Jonnaidi Dasa — LAMR
50. Nuskan Syarif — AMAN RIAU
51. Imran Ardiansyah — Bappeda Provinsi Riau
52. Syafredo — Saegara Rimba Nusantara (SariNusantara)
53. Abdul Madian — Bappeda Provinsi Riau
54. RIZKY RACHMAWATI — BAPPEDA PROVINSI RIAU
55. Fadil Nandila — Pokja PPS Riau & YKAN
56. Khairul Alim — Diskominfofik
57. Faraz Arcadia Syahri — Kabut Riau
58. RIPALDI AFIF — DISKOMINFOTIK RIAU
59. Tarmidzi — FITRA RIAU

Female/Perempuan:

2

Male/Laki-laki:

4

3. Agenda / Agenda Kegiatan

Summary of Discussion / Ringkasan Pembahasan

Catatan Diskusi:

A. Paparan Narasumber

1. Perkembangan dan Capaian Program (Purnama Irawansyah, S.Hut, M.M)

- Inisiasi sejak 2012: Riau sebenarnya telah menginisiasi dokumen penurunan emisi sejak 2012 bersama Universitas Riau (Prof. Rifardi), namun saat itu hanya sampai tahap pernyataan dokumen. Gubernur Samsuar menyatakan komitmen sukarela untuk menurunkan emisi dengan slogan "Riau Hijau".
- Dokumen Readiness: Status program saat ini masih dalam tahap *readiness* mempersiapkan fondasi kelembagaan, data, dan regulasi sebelum masuk ke tahap investasi dan pembayaran berbasis





Kementerian
Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup
Republik Indonesia



UK International
Development
Partnership | Progress | Prosperity

UN-REDD
PROGRAMME



kinerja.

- Area akuntansi 2,6 juta hektar: Area ini telah diidentifikasi oleh BPDH sebagai wilayah yang akan masuk dalam skema Green Riau; akan dipresentasikan dan disosialisasikan hingga tingkat desa.
- Klasifikasi hutan dalam Artis: Tidak hanya hutan alam primer yang masuk kriteria Artis — hutan tanaman pun dapat masuk sesuai informasi dari FAO, sehingga yurisdiksi Riau lebih memungkinkan.
- Kelapa sawit sebagai "pohon": Berdasarkan kajian BRIN yang telah diakomodir oleh Lembaga Bahasa, kelapa sawit kini diklasifikasikan sebagai pohon (bukan tumbuhan), membuka peluang masuknya area sawit dalam perhitungan.
- Kebutuhan pemulihan lingkungan: Estimasi kebutuhan dana pemulihan kondisi lingkungan Riau mencapai tidak kurang dari Rp11,4 triliun jauh melampaui kapasitas anggaran pemerintah semata.
- Dokumen KKMD (Rencana Aksi Mangrove): Dokumen RakkM untuk Provinsi Riau khususnya mangrove sudah dibuka untuk konsultasi publik dan sedang dalam proses penyempurnaan.

2. Paparan Tematik (Fadil Nandila - Pokja PS Riau)

- Data perhutanan sosial perlu dikonsolidasikan agar pemerintah dan para pihak menggunakan rujukan yang sama. Potensi perhutanan sosial berdasarkan PIAPS disebut sekitar 600.000 hektare, namun masih terdapat perbedaan yang perlu dirapikan.
- Kelompok perhutanan sosial tidak perlu menunggu pembayaran karbon untuk memperoleh manfaat ekonomi. Ekowisata, misalnya, perlu menghasilkan kegiatan usaha masyarakat dan bukan hanya pendapatan dari tiket. Peternakan, perikanan dan bentuk usaha lain dapat dikembangkan sambil menunggu peluang pembiayaan karbon.
- KUPS perlu diperkuat sebagai unit usaha, termasuk melalui legalitas bisnis dan akses terhadap sumber pembiayaan lain. Pokja PS tidak harus hanya menunggu UNEP, tetapi dapat menjajaki donor dan sumber pembiayaan lain. Branding GREEN for Riau juga dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengarusutamaan perhutanan sosial.

3. Okto Yugo Setiyo – Jikalahari

- Menyoroti persoalan tata ruang dan perizinan sebagai salah satu tantangan mendasar dalam pengelolaan hutan dan lahan di Riau. Apakah perizinan seharusnya mengikuti tata ruang; atau justru tata ruang akhirnya menyesuaikan izin yang sudah lebih dahulu diterbitkan.
- Menilai persoalan tersebut penting karena berkaitan dengan kemampuan pemerintah mempertahankan hutan alam yang masih tersisa.
- Menyoroti adanya tekanan terhadap: hutan alam; hutan primer; kawasan gambut; dan wilayah yang secara ekologis penting.
- Menekankan perlunya verifikasi dan harmonisasi data agar keputusan GREEN for Riau menggunakan informasi spasial yang akurat.
- Menyampaikan perhatian terhadap peningkatan deforestasi di Riau.
- Menyoroti fungsi lindung gambut yang disebut sekitar 5,3 persen, dan menilai angka tersebut masih sangat rendah serta merupakan persoalan serius.
- Mendorong agar perlindungan gambut menjadi salah satu perhatian penting GREEN for Riau.
- Menekankan pentingnya percepatan pengakuan masyarakat adat dan penetapan hutan adat.
- Menilai masyarakat adat mempunyai posisi penting dalam perlindungan hutan sehingga agenda REDD+ tidak dapat dipisahkan dari pengakuan terhadap hak-hak masyarakat.
- Mendorong GREEN for Riau untuk menggunakan peluang yang tersedia guna memperkuat identifikasi dan perlindungan hutan primer/hutan alam yang masih tersisa

4. Amniati, [S.Pi.](#) (Direktur Riau Women Working Group (RWWG))

- Memfokuskan pembahasan pada posisi dan peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya





Kementerian
Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup
Republik Indonesia



UK International
Development
Partnership | Progress | Prosperity

UN-REDD
PROGRAMME



alam.

- Menyampaikan bahwa perempuan masih sulit menyampaikan pendapat ketika forum berlangsung bersama dan didominasi laki-laki.
- Berdasarkan pengalaman pendampingan di tingkat desa, kebutuhan dan persoalan perempuan tidak selalu terungkap apabila tidak tersedia ruang yang memungkinkan perempuan berbicara secara bebas.
- Menjelaskan bahwa dalam struktur penguasaan dan pengelolaan SDA, perempuan masih berada pada posisi yang paling jauh dari pusat pengambilan keputusan.
- Perempuan masih menghadapi: keterbatasan akses; rendahnya kontrol atas sumber daya; minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan; dan keterbatasan dalam menerima manfaat.
- Menyoroti bahwa kepemilikan lahan lebih banyak tercatat atas nama laki-laki.
- Keputusan mengenai: penggunaan lahan; jenis tanaman; penjualan hasil; serta pengelolaan pendapatan masih banyak berada di tangan laki-laki.
- Menyampaikan bahwa akses perempuan terhadap pembiayaan, termasuk KUR, juga dapat terkendala karena membutuhkan persetujuan pasangan.
- Menyoroti kondisi kelembagaan Perhutanan Sosial seperti LPHD dan kelompok PS yang masih didominasi laki-laki.
- Perempuan sering hanya menempati posisi pendukung atau administratif, bahkan tidak selalu terlibat dalam struktur kepengurusan.
- Menegaskan: “Bagaimana perempuan bisa terlibat kalau aksesnya saja mereka tidak punya?”
- Menjelaskan bahwa perempuan mengalami beban berlapis akibat kerusakan lingkungan. Ketika terjadi: kerusakan hutan; gambut mengering; abrasi; atau hilangnya sumber pangan, perempuan tetap memikul tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga.
- Menyoroti bahwa pengetahuan lokal perempuan dalam mengelola pangan, sumber daya lokal, dan kehidupan keluarga sering belum diakui secara formal. Mendorong: peningkatan kapasitas perempuan; perluasan akses terhadap sumber daya; dukungan agar suara perempuan didengar; keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan; dan peluang pengembangan Perhutanan Sosial yang lebih memberikan ruang kepada perempuan.

B. Sesi Tanya Jawab

1. (Tarmizi - FITRA)

- Tarmizi menyoroti perlunya akuntabilitas sejak awal pelaksanaan program, termasuk bagaimana skema perdagangan karbon dibangun secara adil dan berintegritas. Ia menekankan agar masyarakat yang mengelola hutan tidak hanya menjadi objek, tetapi benar-benar memperoleh manfaat dari skema tersebut. Bagian pertanyaan ditutup dengan penekanan pada kebijakan yang berkeadilan dan berintegritas tinggi.

Ditanggapi oleh: Purnama Irawansyah

- dana tidak serta-merta digunakan secara langsung, tetapi akan terkait dengan mekanisme pengelolaan melalui **BPD LH**;
- area 2,6 juta hektare akan dipetakan dan disosialisasikan lebih lanjut;
- kondisi masyarakat adat dan kondisi lapangan perlu diverifikasi;
- organisasi masyarakat sipil lokal juga berpeluang dilibatkan dan diperkuat kapasitasnya;
- cakupan penerima dan wilayah akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan Benefit Sharing Mechanism;
- pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yurisdiksi berkaitan dengan akses terhadap ART-TREES.

2. Hasan (Pertanyaan/Masukan)



Kementerian
Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup
Republik Indonesia



UK International
Development
Partnership | Progress | Prosperity



- Hasan menyampaikan adanya proses komunikasi yang sebelumnya sempat mengalami kesalahpahaman dan telah diklarifikasi dengan pihak terkait. Ia menegaskan bahwa proses yang sedang berjalan **belum final** dan meminta agar kelompok masyarakat sipil kembali dilibatkan dalam pembahasan selanjutnya.
- Ia juga menyinggung kebutuhan kelembagaan yang dapat mendukung pengelolaan pendanaan, termasuk kemungkinan keberadaan unit yang menangani dana.

3. JS Mundung – Yayasan Inisiatif Bumi Swarnadwipa

- **Pertama, kejelasan area akuntansi 2,6 juta hektare.** Ia meminta penjelasan mengenai perhutanan sosial mana dan masyarakat hukum adat mana yang berada di dalam cakupan tersebut.
- **Kedua, transparansi sumber pendanaan.** Ia meminta kejelasan sumber dana dan mekanisme sejak awal sehingga organisasi masyarakat sipil dapat melakukan pengawasan.
- **Ketiga, integritas tata kelola.** Ia mengingatkan adanya potensi penyimpangan apabila skema pendanaan tidak dibangun dengan mekanisme integritas yang kuat. JS Mundung secara khusus mendorong adanya **pakta integritas** yang berlaku bagi seluruh pihak yang terlibat.

4. Perwakilan CSO

- Menyoroti risiko berkurangnya area akuntansi 2,6 juta hektare karena tidak seluruh wilayah atau pihak mungkin bersedia bergabung.
- Memberikan contoh pengalaman pendampingan sekitar 18.000 hektare yang pada akhirnya tidak bersedia masuk ke dalam skema.
- Mempertanyakan bagaimana GREEN for Riau akan mengantisipasi apabila sebagian area keluar sehingga luas area akuntansi berkurang.
- Menanggapi paparan Fadli mengenai potensi PS sekitar 600.000 hektare dengan mengingatkan bahwa angka tersebut masih merupakan potensi di atas kertas.
- Menyampaikan pengalaman pada tahun 2022 dalam mendampingi 16 usulan Hutan Desa. Dari 16 usulan tersebut, ketika proses berlanjut diketahui lima lokasi telah memiliki PBPH/izin prinsip.
- Menyampaikan pengalaman di wilayah lain dengan potensi sekitar 13.000 hektare, tetapi setelah dilakukan pengecekan ditemukan bahwa area tersebut telah berada dalam penguasaan tiga perusahaan PBPH.
- Menilai tumpang tindih antara potensi Perhutanan Sosial dan PBPH merupakan salah satu hambatan percepatan PS di Riau.
- Menyoroti persoalan yang muncul baik sebelum maupun setelah persetujuan PS. Menekankan bahwa proses tata batas membutuhkan biaya yang cukup besar dan menjadi salah satu hambatan yang harus diperhatikan

C. TANGGAPAN

1. Tanggapan Purnama Irawansyah terhadap Tarmizi – FITRA

Purnama menyampaikan bahwa:

- Dana program tidak akan langsung digunakan atau disalurkan tanpa mekanisme tata kelola.
- BPD LH akan memiliki peran dalam mekanisme pengelolaan/penyaluran pembiayaan.
- Area akuntansi sekitar 2,6 juta hektare masih akan diperdalam dan disosialisasikan hingga diketahui wilayah serta desa yang tercakup.
- Data masyarakat adat dan kondisi aktual di lapangan masih perlu diverifikasi.
- GREEN for Riau perlu melibatkan berbagai pihak karena pemerintah memiliki keterbatasan dalam



Kementerian
Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup
Republik Indonesia



UK International
Development
Partnership | Progress | Prosperity



menjangkau seluruh wilayah.

- Terdapat peluang untuk memperkuat kapasitas NGO lokal agar dapat ikut mendampingi pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- Cakupan masyarakat, desa, dan penerima manfaat akan dibahas lebih lanjut melalui Benefit Sharing Mechanism (BSM).
- Pendekatan REDD+ yang dibangun adalah pendekatan yurisdiksi, bukan sekadar proyek pada satu lokasi tertentu.

2. Tanggapan terhadap Masukan Hasan

- Ditegaskan bahwa proses yang sedang berlangsung masih dalam tahap penyusunan dan belum final.
- Masukan organisasi masyarakat sipil masih dapat diberikan.
- CSO akan kembali dilibatkan dalam diskusi dan konsultasi berikutnya.
- Komunikasi antarpada pihak perlu terus diperbaiki agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai status dokumen dan proses program.
- Moderator menempatkan masukan tersebut sebagai bagian dari agenda yang perlu dilanjutkan dalam tahapan berikutnya.

3. Tanggapan Purnama/Tim GREEN for Riau terhadap JS Mundung

Poin tanggapan:

- Risiko kebocoran atau penyimpangan harus dijawab melalui safeguards yang kuat.
- Lembaga atau pihak yang terlibat dalam penyaluran dan pelaksanaan program perlu memiliki kredibilitas serta kapasitas yang memadai.
- Pada tahap yang sedang berlangsung terdapat dukungan pembiayaan dari UNEP.
- Area 2,6 juta hektare akan dibahas kembali dalam konsultasi publik dan masih terbuka terhadap masukan serta koreksi.
- Organisasi masyarakat sipil yang memiliki pengalaman dan data tingkat tapak diharapkan memberikan masukan.
- Setiap area perlu diketahui kondisi aktualnya secara lebih rinci, misalnya: hutan alam; sawit; hutan tanaman; perhutanan sosial; wilayah masyarakat adat; atau tutupan lainnya.
- Akan dibangun rambu atau kriteria mengenai jenis kegiatan yang dapat memperoleh dukungan pembiayaan.
- Dengan demikian, pendanaan tidak diberikan tanpa dasar kegiatan, kriteria, dan mekanisme pengawasan yang jelas.

4. Tanggapan Purnama Irawansyah- Kepala Bapedda terhadap Paparan Fadli Nandila

- Karbon ditempatkan sebagai tambahan manfaat atau “bonus”.
- Fokus utama harus tetap pada aksi nyata di tingkat tapak.
- Kegiatan perlu diarahkan pada: pemberdayaan masyarakat; pengembangan ekonomi lokal; perbaikan kondisi lingkungan; dan restorasi ekosistem.
- Menurut Purnama, manfaat karbon pada akhirnya harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat sekaligus pemulihan ekosistem.



Kementerian
Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup
Republik Indonesia



UK International
Development
Partnership | Progress | Prosperity

UN-REDD
PROGRAMME



4. Agreements and Follow-up Actions / Kesepakatan dan Tindak Lanjut

Required Follow-up (memerlukan tindak lanjut)

1. Pak Purnama: Tanggal 7 (bulan berjalan): Pelaksanaan *high-level meeting* sekaligus konsultasi publik untuk membahas dan menyempurnakan area akuntansi 2,6 juta hektar, termasuk masukan dari CSO yang bergerak di lapangan.
2. Tanggal 8: Pembahasan lanjutan yang bersifat tidak final, masih akan dibahas lebih lanjut bersama semua pihak.
3. Hingga Maret 2027: Pembahasan di level BSM (Badan/Struktur terkait) untuk menentukan cakupan desa yang akan di-cover (termasuk apakah hanya 818 desa atau lebih).
4. Sekretariat Green Riau: Akan menyusun dokumen panduan (semacam ESMF versi Bank Dunia) yang memuat patokan kegiatan yang dapat didanai, garis besar kegiatan AP, dan mekanisme pengawasan.
5. Kompilasi data PS: Dinas Kehutanan Provinsi (PPS Riau) sedang mengkompilasi seluruh data Perhutanan Sosial agar semua dinas memiliki data yang sama dan konsisten.
6. Pemberdayaan NGO lokal: Program sedang memikirkan mekanisme pemberdayaan NGO lokal sebagai pembina lapangan, mengingat keterbatasan kapasitas sekretariat untuk menjangkau seluruh wilayah.
7. Masukan tertulis dari peserta: Peserta diminta memberikan masukan melalui tautan (link) yang disediakan; sekretariat berkomitmen memberikan respons terhadap masukan tersebut.
8. Suara perempuan dalam dokumen: Sekretariat akan menyampaikan usulan konkret dari forum ini kepada konsultan GETSI untuk dimasukkan dalam dokumen implementasi.

Documentation / Dokumentasi Foto





Kementerian
Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup
Republik Indonesia



UK International
Development
Partnership | Progress | Prosperity

UN-REDD
PROGRAMME

